



DISDUKCAPIL KOTA TANJUNGBALAI



# RENSTRA 2025-2029

Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kota  
Tanjungbalai

2025



## KATA PENGANTAR


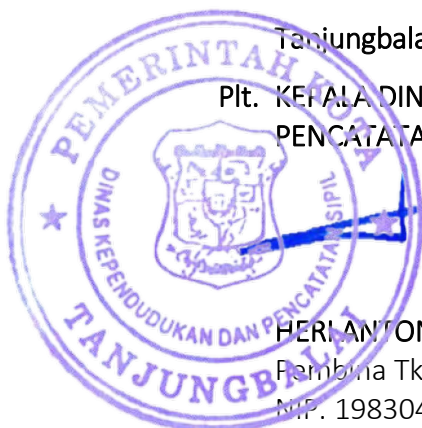
Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029 ini berhasil diselesaikan. Dokumen ini merupakan pedoman utama bagi Disdukcapil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama 5 (lima) tahun ke depan.

Melalui Renstra ini, Disdukcapil Kota Tanjungbalai menetapkan tujuan dan sasaran yang terfokus pada peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan (Adminduk) yang cepat, mudah, akurat, dan berbasis digital, demi mewujudkan tertib administrasi kependudukan yang paripurna. Dengan demikian, data Adminduk yang dihasilkan akan menjadi dasar bagi setiap program pembangunan dan kebijakan pelayanan publik lainnya di Kota Tanjungbalai. Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029 adalah "Mewujudkan Tanjungbalai Elok, Maju, Agamais, dan Sejahtera (EMAS)" dan Misi Wali Kota, yaitu "Elok tata kelola pemerintahan (transparan, akuntabel, dan berprestasi) dan penataan kota yang humanis" serta aspek peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui data kependudukan yang akurat dan terpercaya.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Renstra ini tidak akan terwujud tanpa dukungan, koordinasi, dan kerja sama yang baik dengan seluruh Perangkat Daerah, DPRD, sektor swasta, dan seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, kami berharap dokumen ini dapat menjadi acuan yang jelas dan dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh jajaran Disdukcapil Kota Tanjungbalai. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita semua dalam upaya mewujudkan Kota Tanjungbalai EMAS.

Tanjungbalai, 07 November 2025

Pt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KOTA TANJUNGBALAI



HERI ANTONI, S.STP, MAP

Pembina Tk.I

NIP. 19830416 200212 1 001



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	5
BAB II .....	7
<b>GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DISDUKCAPIL KOTA TANJUNGBALAI .....</b>	<b>7</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	7
2.2 Sumberdaya Disdukcapil .....	13
2.3 Kinerja Pelayanan Disdukcapil.....	18
2.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	22
2.5. Mitra PD dalam Pelayanan .....	23
2.6 Permasalahan Pelayanan .....	24
2.7 Isu Strategis.....	25
BAB III .....	27
<b>TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>27</b>
3.1 Tujuan Renstra 2025-2029.....	27



3.2 Sasaran Renstra 2025-2029 .....	28
3.3 Strategi dan Arah Kebijakan .....	29
<b>BAB IV.....</b>	<b>31</b>
<b>PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA DISDUKCAPIL.....</b>	<b>31</b>
4.1 Rencana Program dan Kegiatan .....	31
<b>BAB V.....</b>	<b>69</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>69</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (RENSTRA) adalah Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan program strategis yang disusun oleh setiap unit kerja di lingkungan pemerintah daerah. Renstra PD merupakan penjabaran dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang disusun oleh kepala daerah terpilih.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada Pasal 109 disebutkan bahwa Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah dilakukan bersamaan dengan Penyusunan rancangan awal RPJMD.

Penyusunan Renstra PD juga berpedoman pada Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dimana dalam Inmendagri tersebut juga sudah diatur tentang sistematika penulisan Renstra PD. Penyusunan Renstra PD tahun 2025-2029 ini juga didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih. Dalam konteks ini, visi pembangunan Kota Tanjungbalai 2025-2029 adalah "Terwujudnya Kota Tanjungbalai yang Elok, Maju, Agamais, dan Sejahtera" yang disingkat menjadi Tanjungbalai EMAS. Renstra PD Kota Tanjungbalai tahun 2025-2029 juga harus selaras dengan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara. Keselarasan ini penting agar pembangunan di tingkat daerah tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan mendukung pencapaian tujuan nasional. Renstra Disdukcapil tahun 2025-2029 disusun berdasarkan analisis mendalam terhadap kondisi nyata di lapangan, yaitu kebutuhan masyarakat akan pelayanan dokumen kependudukan yang cepat, mudah, dan akurat terus meningkat. Data kependudukan yang valid merupakan tulang punggung bagi program-program pemerintah, baik untuk perencanaan



pembangunan, penyaluran bantuan sosial, maupun penyelenggaraan Pemilu. Disdukcapil memiliki peran krusial dalam memastikan data ini selalu mutakhir dan dapat diakses. Serta adopsi teknologi informasi menjadi keharusan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tanjungbalai tahun 2025-2029 juga harus sejalan dengan "Asta Cita" Presiden terpilih. Keterkaitan ini memastikan bahwa program-program di tingkat daerah mendukung target-target nasional, khususnya dalam hal pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif. Sistem perencanaan pembangunan di Indonesia mengharuskan adanya sinergi vertikal. Artinya, setiap Renstra PD harus menjadi turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang diadaptasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan visi-misi Presiden. Ini memastikan bahwa program Disdukcapil Kota Tanjungbalai tidak berjalan sendiri, melainkan mendukung program Asta Cita secara menyeluruh. Sesuai dengan Hasil Pembahasan Desk Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Koordinasi Teknis Perencanaann Pembangunan 2025 antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara berikut adalah mengenai Asta Cita Presiden yang dapat di selaraskan dengan Renstra PD Disdukcapil yaitu "Memperkuat Pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran Perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas." Melalui harmonisasi ini, Renstra Disdukcapil Kota Tanjungbalai tidak hanya memenuhi kebutuhan administratif, tetapi juga berkontribusi secara langsung pada pencapaian agenda pembangunan nasional yang diamanatkan oleh Asta Cita Presiden.

Fungsi Renstra perangkat daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah adalah sebagai landasan dan pemberi arah dalam pelaksanaan kegiatan di perangkat daerah selama lima tahun, adapun proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana tertuang pada Gambar 1.1



Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tanjungbalai 2025-2029 memiliki dasar hukum yang kuat dan berjenjang, dari tingkat nasional hingga peraturan daerah. Berikut adalah Landasan hukum dalam penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2024 tentang Kota Tanjungbalai di Provinsi Sumatera Utara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Dan Penerapan Standart Pelayanan Minimal;



10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaga Negara RI Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
15. Peraturan Presiden Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 adalah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.
16. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Didaerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diatur Beberapa Kali, Diubah Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tanggungbalai;
22. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Administrasi Kependudukan;
23. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang RPJPD Kota Tanggungbalai Tahun 2025-2045;
24. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang RPJMD Kota Tanggungbalai Tahun 2025-2029.



### 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029 memiliki maksud dan tujuan utama untuk memastikan pelayanan administrasi kependudukan yang prima dan terarah.

#### Maksud Penyusunan Renstra Disdukcapil

Maksud utama penyusunan Renstra Disdukcapil untuk menyediakan acuan atas pedoman yang jelas bagi Disdukcapil untuk melaksanakan tugas dan fungsinya agar sejalan dengan arah pembangunan kota secara keseluruhan untuk periode 5 (lima) tahun ke depan.

#### Tujuan Penyusunan Renstra Disdukcapil

Tujuan dari penyusunan Renstra Disdukcapil adalah:

1. Pedoman Kerja: Renstra berfungsi sebagai pedoman kerja bagi seluruh jajaran Disdukcapil dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan program serta kegiatan selama lima tahun ke depan;
2. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Optimal: Menyusun program-program prioritas yang berfokus pada peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan, seperti percepatan penerbitan dokumen, kemudahan akses layanan, dan validitas data;
3. Meningkatkan Akuntabilitas: Menjadi tolok ukur untuk mengukur kinerja dinas. Dengan adanya Renstra, setiap capaian dan target dapat dievaluasi secara terukur, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran;
4. Menjamin Konsistensi Rencana: Memastikan Renstra bahwa rencana teknis Disdukcapil yaitu mewujudkan pelayanan yang cepat, akurat, dan terintegrasi, selaras dengan visi dan misi Pemerintah Kota Tanjungbalai yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai 2025-2029 disusun sebagai berikut :

a) Bab I Pendahuluan terdiri atas :

1.1 Latar belakang

1.2 Landasan hukum

1.3 Maksud dan tujuan

1.4 Sistematika penulisan

b) Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Disdukcapil terdiri atas :

2.1 Tugas, fungsi, dan struktur Organisasi Disdukcapil



2.2 Sumber daya Disdukcapil

2.3 Kinerja Pelayanan Disdukcapil

2.4 Kelompok sasaran layanan Disdukcapil

2.5 Mitra PD dalam Pelayanan

2.6 Permasalahan Pelayanan Disdukcapil

2.7 Isu Strategis

c) Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Disdukcapil terdiri atas :

3.1 Tujuan Renstra Disdukcapil Tahun 2025-2029

3.2 Sasaran Renstra Disdukcapil Tahun 2025-2029

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Disdukcapil dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

d) Bab IV Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Disdukcapil terdiri atas :

4.1 Uraian Program

4.2 Uraian Kegiatan

4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif

4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran melalui IKU perangkat Daerah

4.5 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah melalui IKK

e) Bab V Penutup



## BAB II

# GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGI DISDUKCAPIL KOTA TANJUNGBALAI

### 2.1 Tugas, fungsi, dan struktur Organisasi Disdukcapil

Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tanjungbalai diatur berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Tanjungbalai. Secara umum, Disdukcapil Kota Tanjungbalai memiliki peran vital dalam mengelola seluruh administrasi kependudukan bagi warga Kota Tanjungbalai.

#### A. Tugas Pokok

Tugas utama Disdukcapil Kota Tanjungbalai adalah membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota Tanjungbalai. Serta tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dalam melaksanakan urusan pemerintahan adalah memberikan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang prima kepada seluruh Masyarakat Kota Tanjungbalai.

#### B. Fungsi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tanjungbalai memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kota Tanjungbalai. Fungsi Disdukcapil mencakup seluruh siklus hidup penduduk, mulai dari kelahiran hingga kematian, serta pengelolaan data secara menyeluruh.

Fungsi dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan:

1. Pendaftaran Penduduk: Melakukan pencatatan dan pendataan terhadap setiap penduduk, termasuk penerbitan dokumen identitas seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Identitas Anak (KIA). Fungsi ini memastikan setiap individu terdata secara resmi sebagai warga negara.
2. Pencatatan Sipil: Mencatat peristiwa-peristiwa penting yang dialami oleh penduduk. Peristiwa ini meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian. Hasil dari



pencatatan ini adalah dokumen-dokumen sah seperti akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, dan akta perceraian.

3. Pengelolaan Data Kependudukan Fungsi ini sangat krusial. Disdukcapil bertanggung jawab untuk:
  - o Mengelola dan mengoperasikan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
  - o Memastikan data penduduk akurat, valid, dan terpusat, sehingga setiap penduduk memiliki satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang unik dan sah.
  - o Menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi penduduk.
4. Pemanfaatan Data Disdukcapil berperan sebagai penyedia data kependudukan yang akurat untuk berbagai keperluan, seperti:
  - o Perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah.
  - o Penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran.
  - o Validasi data untuk layanan publik lain seperti BPJS, perbankan, dan pendidikan.

#### Fungsi dalam Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

1. Pencatatan Peristiwa Penting Disdukcapil berfungsi untuk mencatat peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan setiap individu, yang hasilnya dituangkan dalam dokumen sah, seperti:
  - o Akta Kelahiran.
  - o Akta Kematian.
  - o Akta Perkawinan dan Akta Perceraian.
  - o Pengakuan, pengesahan, dan pengangkatan anak.
2. Penerbitan Dokumen Fungsi ini memastikan setiap warga negara memiliki dokumen-dokumen vital yang sah dan diakui oleh negara. Dokumen-dokumen ini menjadi dasar untuk mendapatkan hak-hak lain, seperti hak waris, kewarganegaraan, dan jaminan sosial.
3. Manajemen Dokumen Arsip Disdukcapil juga berfungsi untuk mendokumentasikan dan mengarsipkan seluruh dokumen pencatatan sipil. Hal ini penting untuk menjaga keaslian data dan mempermudah akses jika sewaktu-waktu dibutuhkan kembali oleh masyarakat.

Secara keseluruhan, fungsi Disdukcapil Kota Tanjungbalai adalah memberikan perlindungan hukum dan identitas resmi kepada seluruh penduduk Kota Tanjungbalai, sekaligus



menjadi sumber data utama untuk berbagai kebutuhan administrasi dan perencanaan pembangunan negara.

### C. Struktur organisasi

Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Tanjungbalai terdiri dari beberapa unit kerja utama yang memiliki peran spesifik. Berikut adalah susunan organisasinya secara umum:

#### Kepala Dinas

Kepala Dinas adalah pimpinan tertinggi di Dinas Dukcapil. Ia bertanggung jawab penuh atas seluruh kebijakan dan operasional dinas, serta mengkoordinasikan semua unit kerja di bawahnya. Kepala Dinas juga bertugas merumuskan kebijakan teknis di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

#### Sekretariat

Sekretariat memiliki peran vital dalam mendukung tugas-tugas teknis dan administratif seluruh dinas. Unit ini dipimpin oleh seorang Sekretaris dan membawahi beberapa subbagian, seperti:

- Subbagian Umum dan Kepegawaian: dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian (Kasubbag) Umum dan Kepegawaian. Unit ini berada di bawah Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Tanjungbalai. Secara umum, tugas dan fungsi Kasubbag Umum dan Kepegawaian adalah untuk memastikan seluruh administrasi internal dinas berjalan lancar, baik yang terkait dengan operasional sehari-hari maupun pengelolaan sumber daya manusia serta mengurus surat-menyurat, tata usaha, dan urusan kepegawaian internal dinas;
- Subbagian Perencanaan dan Keuangan: dipimpin oleh Kepala Subbagian (Kasubbag) Perencanaan dan Keuangan berada di bawah Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dan memiliki peran penting dalam mengelola aspek anggaran dan program kerja. Tugas dan fungsi utama dari Kasubbag Perencanaan dan Keuangan meliputi Penyusunan Anggaran, Pengelolaan Keuangan, Perencanaan Program kerja dinas, menginventarisasi kegiatan tahunan, serta Penyusunan Laporan keuangan dan laporan kinerja dinas secara berkala. Secara ringkas, posisi ini memastikan bahwa semua kegiatan operasional dinas, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, didukung oleh alokasi anggaran yang tepat dan dikelola dengan akuntabel.



### Bidang-Bidang Teknis

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai memiliki beberapa bidang teknis yang fokus pada pelayanan publik, yaitu:

#### *Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk:*

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Tanjungbalai. Berdasarkan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk memiliki peran sentral dalam administrasi kependudukan. Tugas dan fungsinya berfokus pada pelayanan langsung kepada masyarakat terkait data kependudukan. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, yang meliputi penerbitan, penggantian, dan pemutakhiran data pada KTP-el dan Kartu Keluarga. Perekaman Data Biometrik Melakukan perekaman data sidik jari, iris mata, dan foto wajah bagi penduduk yang belum memiliki KTP-el. Pelayanan Pindah Datang Penduduk termasuk penerbitan Surat Keterangan Pindah (SKP) dan Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD).

Pelayanan Pengesahan Data yaitu melakukan legalisasi dan pengesahan dokumen kependudukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Serta Pelayanan KIA yaitu menerbitkan Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai identitas resmi bagi anak-anak dibawah usia 17 tahun. Secara umum, bidang ini adalah unit yang fokus pada pelayanan langsung kepada masyarakat terkait data kependudukan dan penerbitan dokumen identitas.

#### *Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil:*

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas dan memiliki peran strategis dalam menjalankan program kerja di bidangnya. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan pencatatan sipil, seperti pencatatan peristiwa penting, seperti akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, dan akta perceraian serta dokumen-dokumen penting lainnya yang berkaitan dengan Bidang Pencatatan Sipil.



### *Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data:*

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Secara umum, tugas utama dari bidang ini adalah:

- Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK): Bertanggung jawab untuk mengelola, memelihara, dan mengembangkan sistem informasi yang digunakan untuk pencatatan dan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
- Pemanfaatan Data dan Informasi Kependudukan: Mengatur dan memfasilitasi pemanfaatan data kependudukan untuk berbagai kebutuhan. Pemanfaatan data ini dapat digunakan oleh lembaga pemerintah dan swasta untuk keperluan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, penegakan hukum, dan lainnya.
- Pengamanan Data Kependudukan: Menjamin keamanan dan kerahasiaan data kependudukan. Bidang ini memastikan bahwa data tidak disalahgunakan dan hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang berwenang. Hal ini mencakup penerapan sistem keamanan siber, audit, dan kebijakan akses data.

### Analisis Kebijakan Ahli Muda

Jabatan Analisis Kebijakan Ahli Muda di bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) memiliki tugas utama untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil. Secara umum, tugas pokoknya adalah membantu pimpinan unit kerja dalam merumuskan dan mengevaluasi kebijakan teknis di setiap bidang Dukcapil. Analisis Kebijakan Ahli Muda juga berfungsi sebagai pemikir strategis yang menjembatani data dan masalah di lapangan dengan keputusan dan regulasi yang dikeluarkan oleh pimpinan di setiap masing-masing bidang. Tugas mereka sangat penting untuk memastikan layanan Dukcapil berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

### Jabatan Fungsional

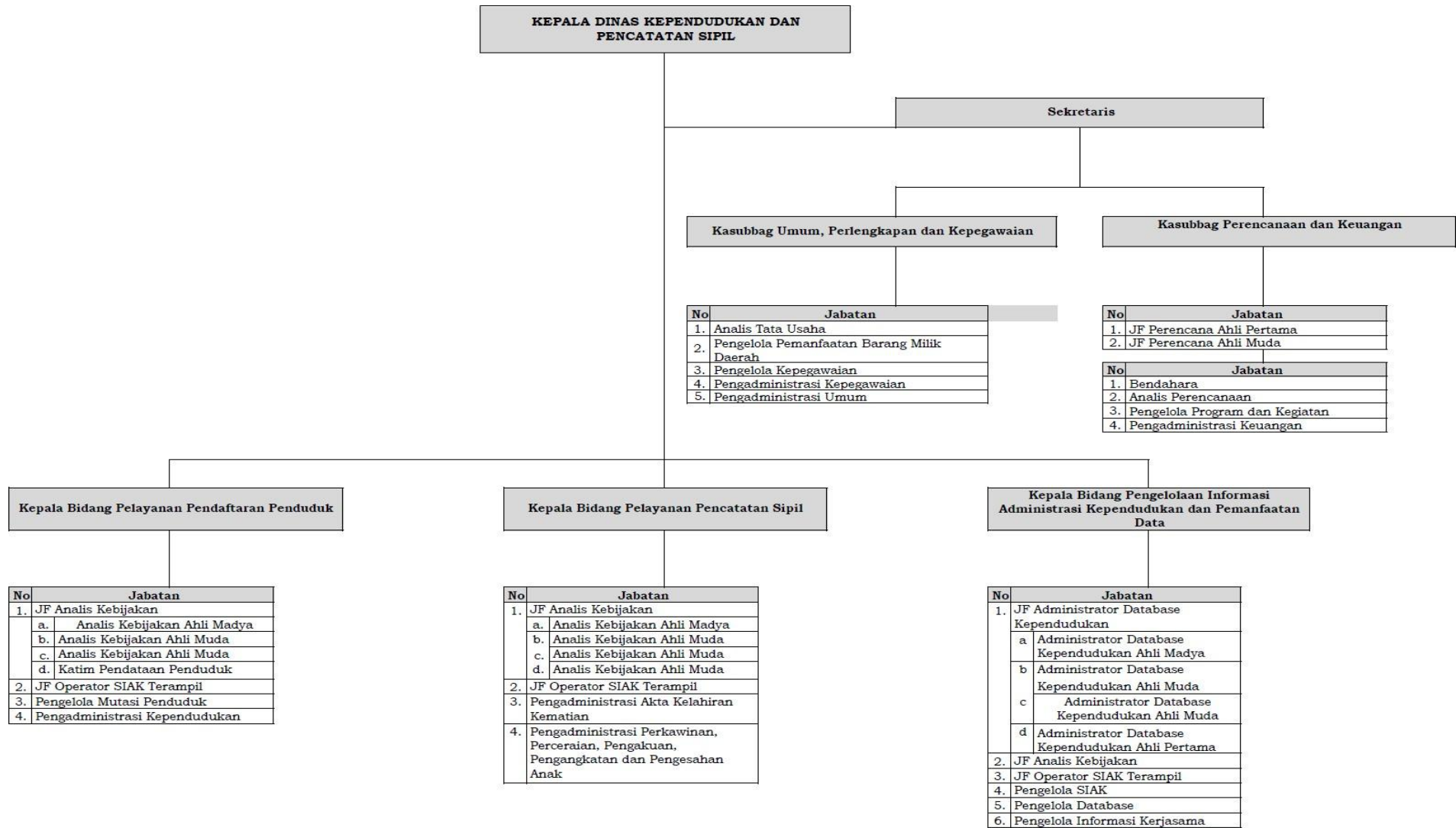
Jabatan Fungsional yang diisi oleh pejabat fungsional tertentu, yang keahliannya dibutuhkan untuk mendukung operasional dinas dan untuk memastikan setiap aspek layanan dapat berjalan efektif dan efisien.

### Jabatan Pelaksana

Jabatan Pelaksana pada Disdukcapil adalah jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan tugas teknis dan administrasi yang mendukung operasional Disdukcapil.



Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Disdukcapil Kota Tanjungbalai



Sumber : Disdukcapil Kota Tanjungbalai, 2024



## 2.2 Sumberdaya Disdukcapil

### Sumberdaya Aparatur Disdukcapil

Ketersediaan SDM berpengaruh langsung terhadap kinerja Disdukcapil. Oleh karena itu peningkatan kualitas sumberdaya aparatur menjadi salah satu sasaran prioritas disdukcapil. Berdasarkan sumber data kepegawaian Disdukcapil Kota Tanjungbalai, tercatat jumlah ASN sampai dengan bulan Desember 2024 sebanyak 17 orang, dengan komposisi jabatan dalam struktur organisasi Disdukcapil Kota Tanjungbalai sebagai berikut:

Tabel 2.2.1. Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Jab Fung	Jab pel	Jumlah
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	1	2	-	3	6
3	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	1	-	2	-	3
4	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	-	1	-	3	-	4
5	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	-	1	-	3	-	4
	JUMLAH	1	4	2	8	3	18

Sumber : Disdukcapil Kota Tanjungbalai, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat secara keseluruhan, total kepegawaian Disdukcapil adalah 18 orang, dengan rincian total sebagai berikut:

- a. Eselon II berjumlah 1 orang yaitu Kepala Dinas
- b. Eselon III berjumlah 4 orang yaitu di isi oleh 1 (satu) orang Sekretaris dan 3(tiga) orang Kepala Bidang
- c. Eselon IV berjumlah 2 orang yaitu Kepala Sub Bagian
- d. Jabatan Fungsional (Jab Fung) berjumlah 8 orang yang diisi oleh Analis Kebijakan ahli Muda
- e. Jabatan Pelaksana (Jab Pel) berjumlah 3 orang yaitu Pengelola Pemanfaatan BMD, Bendahara dan Pengadministrasi Kepegawaian

Secara kuantitas, Sumber Daya Manusia (SDM) kepegawaian di Disdukcapil Kota Tanjungbalai saat ini berada dalam kondisi sangat minim dan terbatas. Jumlah 18 orang pegawai yang tersebar dari Eselon II hingga Pelaksana ini tidak proporsional dan jauh dari ideal untuk mengampu beban kerja yang tinggi serta cakupan pelayanan publik yang luas di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



Dalam menjalankan tupoksinya, Disdukcapil didukung ASN yang memiliki jenjang pendidikan yang bervariasi dan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.2 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No	Uraian	S3	S2	S1/D4	D3	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	Kepala Dinas	-	1	-	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	-	3	-	-	-	-	3
3	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-	1	-	-	-	-	1
4	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-	1	-	-	-	-	1
5	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	-	-	1	-	-	-	-	1
6	Pejabat Fungsional	-	5	3	-	-	-	-	8
7	Jabatan Pelaksana	-	-	-	1	2	-	-	3
	JUMLAH		6	9	1	2	-	-	18

Sumber: Disdukcapil Kota Tanjungbalai, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kondisi kepegawaian di Disdukcapil Kota Tanjungbalai menunjukkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang tinggi dilihat dari latar belakang pendidikan, dengan total 18 orang pegawai. Secara keseluruhan, mayoritas pegawai memiliki latar belakang pendidikan Sarjana (S1/DIV) sebanyak 9 orang terdiri dari Kepala Bidang, Kasubag serta beberapa orang Pejabat Fungsional, dan Pascarsarjana (S2) sebanyak 6 orang diantaranya adalah Kepala Dinas dan 5 orang lagi adalah Pejabat Fungsional yang tersebar pada Bidang-bidang, serta DIII 1 orang dengan Jabatan Pelaksana, dan pendidikan paling rendah yaitu SLTA berjumlah 2 orang juga sebagai Jabatan Pelaksana.

Oleh karena itu berdasarkan analisis kebutuhan pegawai, dalam menjalankan tupoksinya Disdukcapil masih kekurangan pegawai baik dari aspek kuantitas maupun kompetensi pada jabatan struktural dan fungsional serta jabatan pelaksana. Menindaklanjuti hal ini dengan berpedoman pada Peraturan Menpan Reformasi Birokrasi RI Nomor 41 tahun 2018 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi PNS di Lingkungan Instansi Pemerintah,



maka setiap tahun Disdukcapil mengajukan penambahan personil namun belum terpenuhi karena berkaitan dengan kebijakan rekrutmen pegawai, sehingga pemenuhan kebutuhan pegawai dilakukan secara bertahap. Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsinya, sementara ini Disdukcapil Kota Tanjungbalai mengupayakan penambahan tenaga non PNS yang penempatannya tersebar di seluruh bidang dan sekeretariat, hal ini disesuaikan dengan kebutuhan untuk kelancaran pelaksanaan program kegiatan Disdukcapil Kota Tanjungbalai.

Sementara itu, profil sumberdaya aparatur Disdukcapil menurut golongan disajikan pada tabel berikut :

Tabel. 2.2.3. Profil SDM Disdukcapil Berdasarkan Golongan

No	Uraian	GOLONGAN		
		GOL IV	GOL III	GOL II
1	Kepala Dinas	1	-	-
2	Sekretariat	1	2	-
3	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	1	-
4	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	1	-	-
5	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	1	-	-
6	Pejabat Fungsional	1	7	-
7	Jabatan Pelaksana	3	-	-
	JUMLAH	8	10	-

Sumber: Disdukcapil Kota Tanjungbalai, 2024

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah SDM Komposisi golongan di Disdukcapil didominasi oleh Golongan III sebanyak 10 (sepuluh) orang dan golongan IV sebanyak 8 (delapan) orang. Tidak ada satu pun pegawai yang menempati Golongan II (0 orang). Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Komposisi SDM di Disdukcapil belum memenuhi standar untuk dapat bekerja optimal.



## Aset dan Sarana Prasarana

Bangunan gedung kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai merupakan bangunan permanen yang kondisinya memadai berada di Jalan MT. Haryono, Kel. Karya, Kec. Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai. Bangunan ini didukung sarana dan prasarana perlengkapan gedung kantor yang cukup memadai. Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Disdukcapil Kota Tanjungbalai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2.2.4. Rekapitulasi Sarana Dan Prasarana Disdukcapil Kota Tanjungbalai Sampai Dengan Desember Tahun 2024

No	Nama Barang	KONDISI		Jumlah Barang
		BAIK	RUSAK BERAT	
1	2	3	4	5
1	Porteble Generating Set		RUSAK BERAT	2
2	Porteble Generating Set		RUSAK BERAT	6
3	Mini Bus ( Penumpang 14 orang kebawah )	BAIK		2
4	Sepeda Motor	BAIK		18
5	Sepeda Motor		RUSAK BERAT	7
6	Mesin Ketik Manual LongeWagen		RUSAK BERAT	1
7	Mesin Absen ( Time Rekorde )		RUSAK BERAT	1
8	Mesin Foto Copy		RUSAK BERAT	1
9	Lemari Besi / Metal	BAIK		23
10	Lemari Kayu		RUSAK BERAT	1
11	Lemari Kayu	BAIK		2
12	Filling Kabinet Besi / Metal	BAIK		9
13	Filling Kabinet Besi / Metal		RUSAK BERAT	1
14	Brankas		RUSAK BERAT	1
15	Brankas	BAIK		1
16	Lemari Arsip	BAIK		5
17	Lemari Kaca	BAIK		4
18	Lemari Kaca		RUSAK BERAT	2
19	Camera Control Television	BAIK		1
20	Papan Visual	BAIK		2
21	Alat Penghancur Kertas	BAIK		4
22	Mesin Absensi	BAIK		1
23	White Board Electronic	BAIK		1
24	Mesin Antrian	BAIK		1
25	Papan Pengumuman		RUSAK BERAT	1
26	Papan Pengumuman	BAIK		1
27	Papan Tulis	BAIK		1
28	Papan Data		RUSAK BERAT	2
29	Papan	BAIK		1
30	Mesin laminating	BAIK		2
31	Card writer KTP elektronik	BAIK		1
32	Meja kerja	BAIK		13
33	Kursi Besi / Metal	BAIK		2
34	Meja Rapat	BAIK		3
35	Meja 1/2 Biro	BAIK		14
36	Kursi Rapat		RUSAK BERAT	6
37	Kursi Tamu	BAIK		10



38	Kursi Putar	BAIK		12
39	Bangku Tunggu		RUSAK BERAT	22
40	Bangku Tunggu	BAIK		2
41	Nakas	BAIK		1
42	Kursi Sofa	BAIK		3
43	Lemari buku	BAIK		1
44	Kursi Kerja		RUSAK BERAT	12
45	Kursi Kerja	BAIK		3
46	Mesin Pengisap Debu	BAIK		2
47	AC		RUSAK BERAT	17
48	AC	BAIK		27
49	Power Conditioner	BAIK		1
50	Exhaust Fan		RUSAK BERAT	3
51	Radio	BAIK		1
52	Televisi		RUSAK BERAT	1
53	Parabola dan Reciver		RUSAK BERAT	1
54	Televisi	BAIK		1
55	Sound System		RUSAK BERAT	2
56	Sound System	BAIK		1
57	Power Supply Unit	BAIK		3
58	Power Supply Unit		RUSAK BERAT	16
59	UPS / Stabilizer	BAIK		5
60	Stabilisator		RUSAK BERAT	2
61	Camera Video		RUSAK BERAT	6
62	Camera Video	BAIK		1
63	Dispenser		RUSAK BERAT	1
64	Dispenser	BAIK		5
65	Mimbar / Podium	BAIK		1
66	Handy Cam		RUSAK BERAT	1
67	Gorden	BAIK		1
68	Papan Struktur Organisasi		RUSAK BERAT	1
69	Showcase	BAIK		1
70	Video conference set	BAIK		1
71	Meja Kerja Pejabat Eselon II / III	BAIK		3
72	Kursi Kerja Pejabat Eselon III		RUSAK BERAT	5
73	Tape Rekaman	BAIK		1
74	Proyektor+Attachment	BAIK		1
75	Camera Digital	BAIK		4
76	Camera Digital		RUSAK BERAT	4
77	Tablet	BAIK		2
78	Telephone ( PABX )		RUSAK BERAT	1
79	Facsimile		RUSAK BERAT	2
80	Hand Phone		RUSAK BERAT	1
81	Hand Phone	BAIK		1
82	Mesin Genset	BAIK		1
83	Local Area Network ( LAN ) / WAN	BAIK		1
84	Wireless ( D-LINK )	BAIK		6
85	Komputer P.C / Server		RUSAK BERAT	1
86	Komputer P.C / Server	BAIK		4
87	Komputer P.C	BAIK		32
88	Komputer P.C		RUSAK BERAT	7
89	Laptop	BAIK		24
90	Laptop		RUSAK BERAT	1
91	Note Book	BAIK		15



92	Note Book		RUSAK BERAT	1
93	Card Reader ( Duali Encoder DE-620L )	BAIK		2
94	Hard Disk	BAIK		3
95	Card Reader	BAIK		1
96	Printer		RUSAK BERAT	50
97	Printer	BAIK		39
98	Scanner	BAIK		20
99	Server	BAIK		3
100	Hub. ( Switch D-Link )		RUSAK BERAT	2
101	Modem ( US Robotics )		RUSAK BERAT	1
102	switch hub ( D-LINK )	BAIK		11
103	Finger Print Solution ( AIBI )	BAIK		8
104	Finger Print Solution ( SOLUTION )	BAIK		1
105	Finger Print Solution ( TOPAZ LBK -462 )	BAIK		4
106	Finger Print Solution ( CMITECH BMT-20 )	BAIK		5
107	Mikrotik rb941	BAIK		1
JUMLAH TOTAL		207	106	581

Sumber: Disdukcapil Kota Tanjungbalai, 2024

Secara umum sarana dan prasarana pendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi tersedia dalam jumlah yang relative cukup memadai namun secara kualitas belum memadai seperti kendaraan dinas, demikian pula peralatan penunjang pekerjaan (komputer, laptop, printer dll) karena anggaran untuk pemeliharaan sangat minim. Peralatan komputer yang termasuk dalam alat-alat kantor sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Disdukcapil sebagian besar telah tersambung dalam jaringan Local Area Network (LAN), tersambung dengan media Kabel UTP maupun WiFi.

Tingkat kerusakan aset di Disdukcapil tergolong tinggi (total 106 unit rusak berat). Kerusakan ini sangat memprihatinkan pada alat pelayanan inti seperti Printer (50 unit), fasilitas publik seperti Bangku Tunggu, dan penunjang lingkungan kerja seperti AC (17 unit) dan Power Supply Unit (16 unit). Kondisi ini secara langsung mengganggu efisiensi kerja, pelayanan publik, dan ketersediaan daya listrik di kantor Disdukcapil.

### 2.3 Kinerja Pelayanan Disdukcapil

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006. Tentang Administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai melaksanakan pelayanan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu :

1. Dokumen kependudukan / Biodata Penduduk
  - a. Kartu Keluarga;
  - b. KTP-EI
2. Akta Pencatatan Sipil dan Surat Keterangan dan lain – lain
  - a. Akta Kelahiran
  - b. Akta Perkawinan



- c. Akta Perceraian
  - d. Akta Kematian
  - e. Akta Pengakuan dan Pengesahan anak
  - f. Akta Pengangkatan (adopsi) anak.
3. Akta Ganti Nama / Catatan Pinggir
  4. Surat Keterangan Pindah – Datang.
  5. Surat Keterangan Kependudukan lainnya

Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai.

Pencapaian kinerja pada tahun pertama Renstra periode yang lalu dibandingkan dengan target per tahunnya dapat dilihat pada Tabel berikut :



Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan di Disdukcapil  
Daerah Kota Tanjungbalai Periode Sebelumnya

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET SPM	TARGET RENSTRA DISDUKCAPIL					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN TAHUN KE-				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Disdukcapil	-	90,00	93,00	95,00	74,07	95,00	82,50	95,00	88,75	95,00	86,95	109,09	102,15	93,42	128,26	91,53
1	Persentase Penduduk ber-KTP Elektronik/ Nasional	3 hari kerja	95,00	97,33	95,00	99,26	99,50	97,98	99,60	99,34	99,60	98,80	96,96	102,33	104,57	100,34	99,30
2	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	3 hari kerja	90,00	96,26	95,00	96,84	97,50	96,65	98,00	99,64	98,00	99,64	93,12	101,81	104,88	101,20	102,19
3	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	3 hari kerja	70,00	72,00	72,00	73,00	60,00	59,88	70,00	54,80	70,00	58,27	85,54	97,22	76,11	95,89	97,12
4	Rasio Pasangan Berakte Nikah	10 hari kerja	75,00	51,30	80,00	56,63	60,00	66,83	70,00	88,62	70,00	73,61	112,23	136,45	110,78	123,61	122,68
5	Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran Usia 0—18 tahun	3 hari kerja	75,00	93,48	80,00	60,43	100,00	99,51	98,00	99,69	98,00	99,72	75,37	104,84	124,61	162,17	99,72
6	Cakupan OPD yang telah memanfaatkan Data Kependudukan	-	42,00	43,00	44,00	45,00	45,00	20,60	65,00	11,76	65,00	11,76	49,04	151,11	26,72	144,4	26,13
7	Tersedianya Profil Kependudukan	1 tahun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Data kinerja pelayanan Disdukcapil menunjukkan gambaran menyeluruh mengenai keberhasilan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan kepuasan publik dalam beberapa tahun terakhir. Secara umum, Disdukcapil menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam memenuhi hak dasar administrasi kependudukan.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan di Disdukcapil menunjukkan kinerja yang fluktuatif namun cenderung positif. Realisasi tahun 2021 dan 2023 berhasil melampaui target Renstra yang ditetapkan (rasio masing-masing 102,15% dan 128,26%). Namun, terdapat penurunan rasio capaian di tahun 2022 (93,42%) dan 2024 (91,53%), menandakan perlunya menjaga konsistensi kualitas pelayanan di tengah kenaikan target.

- Persentase Penduduk ber-KTP Elektronik/Nasional dan Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga secara konsisten mencapai realisasi di atas target Renstra misalnya, di tahun 2022, Rasio Capaian KTP-el mencapai 104,57% dan KK mencapai 104,88%, menunjukkan pelayanan yang melampaui target.
- Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran Usia 0–18 tahun juga menunjukkan kinerja prima, dengan realisasi capaian yang jauh melampaui target Renstra di tahun 2022 (rasio 124,61%) dan bahkan di tahun 2023 (rasio 162,17%), meskipun targetnya meningkat drastis di tahun 2024 (100,00%).
- Rasio Pasangan Berakte Nikah mencatat realisasi capaian yang selalu melampaui target Renstra yang ditetapkan (rasio di atas 110% dari 2020 hingga 2024), kecuali pada tahun 2022 dengan rasio 110,78%.
- Tersedianya Profil Kependudukan tercapai 100% secara sempurna dan konsisten sepanjang periode 2020–2024, menunjukkan stabilitas penyediaan data.
- Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) mulai masif ditargetkan pada tahun 2023 (target 60,00%) dan 2024 (target 70,00%), dan berhasil mencapai rasio capaian yang memuaskan di tahun 2024 (97,12%).
- Cakupan OPD yang telah memanfaatkan Data Kependudukan menjadi indikator kinerja terendah. Meskipun target Renstra di tahun 2023 dan 2024 adalah 65,00%, realisasi capaiannya sangat rendah, yakni hanya 11,76% di kedua tahun tersebut. Rasio capaian di tahun 2024 hanya mencapai 26,13%, menunjukkan bahwa integrasi dan pemanfaatan data kependudukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain masih sangat minim.

Secara umum kinerja Disdukcapil dalam pemenuhan dokumen kependudukan dasar (KTP-el, KK, Akta Kelahiran, dan Akta Nikah) berada pada kategori Sangat Baik dan melampaui target yang



ditetapkan, serta berhasil meraih skor IKM yang memuaskan. Namun, masih kurang pada integrasi dan pemanfaatan data kependudukan. Capaian yang sangat rendah pada indikator Cakupan OPD yang memanfaatkan Data menunjukkan Disdukcapil belum optimal sebagai penyedia database kependudukan tunggal yang dimanfaatkan oleh seluruh sektor pemerintah daerah.

#### 2.4 Kelompok sasaran layanan Disdukcapil

Kelompok sasaran pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Tanjungbalai pada dasarnya mencakup seluruh penduduk Kota Tanjungbalai. Hal ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dukcapil, yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Secara lebih rinci, kelompok sasaran pelayanan Dukcapil Kota Tanjungbalai dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama, yaitu:

- Warga Negara Indonesia (WNI): Ini adalah kelompok sasaran terbesar. Pelayanan yang diberikan meliputi penerbitan dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, dan akta perceraian.
- Anak-anak: Anak-anak yang baru lahir menjadi sasaran utama untuk penerbitan akta kelahiran. Ini penting untuk memastikan hak-hak dasar anak terpenuhi, termasuk hak atas nama dan kewarganegaraan. Selain itu, anak juga menjadi sasaran untuk penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA).
- Penduduk yang Baru Pindah atau Datang: Penduduk yang baru pindah ke Kota Tanjungbalai atau datang dari luar daerah menjadi kelompok sasaran untuk layanan mutasi data kependudukan. Ini termasuk pendaftaran dan pencatatan data baru di database kependudukan Kota Tanjungbalai.
- Penduduk yang Membutuhkan Pembaruan Data: Kelompok ini mencakup penduduk yang mengalami perubahan data pribadi, seperti perubahan status perkawinan, nama, atau alamat. Mereka menjadi sasaran untuk layanan perubahan data pada dokumen kependudukan yang sudah ada, seperti KTP atau KK.
- Penduduk yang Belum Memiliki Dokumen Kependudukan: Kelompok ini seringkali menjadi prioritas bagi Dukcapil. Layanan yang diberikan bertujuan untuk memastikan seluruh penduduk memiliki dokumen kependudukan yang sah, yang merupakan prasyarat untuk mengakses berbagai layanan publik lainnya.



## 2.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Hubungan kemitraan antara Disdukcapil dengan Pengadilan Agama, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pusat Statistik (BPS) didasarkan pada pertukaran dan pemanfaatan data kependudukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing lembaga. Disdukcapil berperan sebagai penyedia data otentik dari Database Kependudukan Terpusat. Mitra kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tanjungbalai, seperti Pengadilan Agama, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pusat Statistik (BPS), memiliki hubungan yang sangat erat dan saling membutuhkan dalam konteks pemberian pelayanan publik dan pemanfaatan data kependudukan. Hubungan ini dikenal sebagai pemanfaatan data kependudukan (PDK) atau data sharing.

Berikut adalah penjelasan hubungan kemitraan tersebut:

### 1. Hubungan dengan Pengadilan Agama (PA)

Hubungan Disdukcapil dengan Pengadilan Agama berpusat pada Pencatatan Perkawinan, Perceraian, dan Perubahan Status Sipil yang sah secara hukum agama dan negara. Pengadilan Agama menerbitkan salinan putusan perceraian (talak/gugat) bagi pasangan muslim, yang secara sah mengubah status sipil mereka. PA juga terlibat dalam proses Isbat Nikah (pengesahan pernikahan). Disdukcapil menggunakan data dari putusan PA untuk melakukan perubahan status perkawinan dalam basis data kependudukan dan menerbitkan dokumen terkait. PA menyediakan legalitas status, Disdukcapil menyediakan pencatatan dan pembaruan data kependudukan.

### 2. Hubungan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Hubungan Disdukcapil dengan KPU adalah hubungan yang krusial untuk memastikan akurasi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Disdukcapil menyediakan Data Kependudukan (Data Penduduk Potensial Pemilih) terbaru dan akurat, yang meliputi Data penduduk yang telah mencapai usia 17 tahun atau sudah menikah (wajib KTP-el) untuk didaftarkan sebagai pemilih baru dan Data penduduk yang mengalami perubahan status (pindah domisili, meninggal dunia) untuk pemutakhiran DPT. KPU memanfaatkan data dari Disdukcapil sebagai bahan dasar utama untuk menyusun dan memutakhirkan DPT. Ini memastikan bahwa pemilih yang berhak tidak terlewat dan pemilih yang tidak berhak (misalnya, yang telah meninggal) dikeluarkan. Disdukcapil menjamin validitas data penduduk, KPU menjamin validitas daftar pemilih berdasarkan data tersebut.



### 3. Hubungan dengan Badan Pusat Statistik (BPS)

Hubungan Disdukcapil dengan BPS berfokus pada Penyediaan Data Dasar untuk Perencanaan Pembangunan dan Sensus. Disdukcapil berfungsi sebagai sumber data kependudukan *de jure* (pencatatan penduduk yang didasarkan atas bukti hukum yang dimiliki penduduk berupa KTP atau Kartu Keluarga) yang sangat rinci melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Disdukcapil menyediakan Data demografi (jumlah penduduk, komposisi umur, jenis kelamin, status perkawinan, dsb.) secara periodic dan juga Data pergerakan penduduk (kelahiran, kematian, migrasi). BPS menggunakan data Disdukcapil sebagai data dasar dan data pembanding yang sah dalam kegiatan statistik, seperti sensus dan survei. Data ini digunakan untuk menghitung proyeksi penduduk, menyusun indikator sosial ekonomi serta membantu pemerintah daerah dalam perencanaan program pembangunan. Disdukcapil menyediakan data mentah administratif, BPS mengolahnya menjadi informasi statistik untuk kebijakan publik.

Secara umum, kemitraan ini merupakan implementasi dari amanat undang-undang yang mewajibkan seluruh lembaga pelayanan publik menggunakan data kependudukan dari Disdukcapil sebagai Data Tunggal atau *Single Identity Number (SIN)* atau Nomor Identitas Tunggal yaitu konsep di mana satu nomor identitas unik digunakan untuk seluruh keperluan layanan publik dan swasta bagi setiap penduduk. Di Indonesia, Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah ditetapkan sebagai *Single Identity Number*.

### 2.6 Permasalahan Pelayanan Disdukcapil

Dalam pelaksanaan fungsi masih terdapat sejumlah permasalahan yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan fungsi Disdukcapil Kota Tanjungbalai secara optimal sebagaimana dapat dipetakan dalam tabel 2.6 berikut ini:

Tabel 2.6 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1. Rendahnya Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	Kurangannya Kesadaran Masyarakat Dalam melengkapi administrasi kependudukan.	1. Kurangnya Pemahaman tentang Pentingnya Dokumen: Masyarakat belum sepenuhnya menyadari fungsi dan dampak hukum dari dokumen kependudukan. Serta sering menunda pelaporan peristiwa kependudukan (kelahiran, kematian, pernikahan, perceraian) ke Disdukcapil dan kurangnya pemahaman akan pentingnya dokumen-dokumen tersebut untuk mengakses layanan puublik lainnya seperti pendidika, kesehatan dan perbankan.
		2. Kesulitan Jarak dan biaya transportasi seringkali menjadi alasan warga di daerah yang jauh dari kantor Disdukcapil serta Keterbatasan Akses Informasi Sosialisasi dan edukasi mengenai



		prosedur pengurusan belum merata dan efektif menjangkau seluruh lapisan masyarakat
2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana	Kurangnya Anggaran untuk melaksanakan Penyediaan Sarana Ruang Administrasi Perkantoran	1. Kurangnya anggaran untuk melaksanakan penyediaan Sarana Ruang Administrasi Perkantoran di Disdukcapil berdampak langsung pada kualitas pelayanan. Sarana ini mencakup segala peralatan dan fasilitas fisik yang mendukung kelancaran operasional pelayanan khususnya seperti Komputer, Laptop dan Printer
3. Peningkatan SDM Aparatur	Kurangnya Pelatihan dan Keterbatasan pelatihan rutin serta kesejahteraan Pegawai yang belum memadai	1. Kurangnya pelatihan yang memadai tentang standar operasional prosedur (SOP) dan etika pelayanan dan pelatihan mengenai teknologi terbaru.
		2. Masih belum memadai nya Kesejahteraan Pegawai yang dapat memicu tindakan penyimpangan.

## 2.7 Isu Strategis

Dijelaskan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, identifikasi isu strategis dilaksanakan guna mengidentifikasi pilihan kebijakan pokok yang dihadapi organisasi, dalam memperhatikan dinamika penyelenggaraan administrasi kependudukan di Indonesia khususnya Kota Tanjungbalai, maka dipandang perlu untuk merumuskan isu strategis yang perlu ditangani, dan kemudian menjadi prioritas langkah maupun kebijakan yang diambil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai. Keterkaitan antara isu strategis dan permasalahan pelayanan Disdukcapil Kota Tanjungbalai dalam pelaksanaan urusan fungsi penunjang pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil dapat dijelaskan pada table berikut :

Tabel 2.7 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	Rendahnya Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	Rendahnya kepemilikan dokumen Adminduk di Disdukcapil Tanjungbalai secara langsung mengganggu validitas data yang seharusnya menjadi dasar alokasi sumber daya dan perencanaan pembangunan sosial-ekonomi yang adil dan berkelanjutan di Kota Tanjungbalai.	Rendahnya kepemilikan dokumen di Tanjungbalai menunjukkan bahwa daerah tersebut masih menghadapi tantangan besar untuk memenuhi komitmen global ini. Anak-anak yang tidak memiliki Akta Kelahiran berisiko menjadi "tidak terlihat" secara hukum.	Rendahnya kepemilikan dokumen di tingkat daerah mengancam keakuratan dan keandalan sistem data nasional.	Rendahnya kesadaran penduduk untuk melapor saat pindah menyebabkan data yang tidak update di daerah asal maupun tujuan, sehingga kepemilikan dokumen (terutama Kartu Keluarga dan KTP-el) menjadi terhambat atau tidak valid secara regional.	Peningkatan Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan melalui pemanfaatan IKD



	Keterbatasan Sarana dan Prasarana	Kurangnya anggaran berdampak pada ruang kerja operator dan administrasi yang tidak memadai karena keterbatasan anggaran berpotensi menurunkan kualitas lingkungan kerja.	Standar global menuntut layanan publik yang cepat dan efisien. Keterbatasan anggaran menyebabkan kegagalan untuk mengganti peralatan lama dengan unit yang efisien.	Banyak daerah menghadapi masalah alokasi Anggaran, padahal kebutuhan untuk pengadaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana tinggi.	Anggaran untuk Disdukcapil seringkali kalah prioritas dibandingkan dengan sektor lain (misalnya, pembangunan infrastruktur fisik, penanganan masalah sosial/kemiskinan, atau kesehatan) yang dianggap lebih mendesak oleh pemerintah daerah regional	Menganggarkan penggantian bertahap peralatan kantor lama dengan model hemat energi untuk menciptakan efisiensi sumber daya jangka panjang.
	Peningkatan SDM Aparatur	Kurangnya Pelatihan Integritas dan kesejahteraan pegawai yang belum memadai dapat meningkatkan potensi praktik mal-administrasi dan pungutan liar (pungli). Hal ini menciptakan ketidakadilan sosial dan merusak kepercayaan publik, yang merupakan aspek kritis dari KLHS sosial.	kurangnya pelatihan dan kesejahteraan pegawai berkaitan dengan tuntutan standar Tata Kelola Pemerintahan Global, Etika Pelayanan Publik, dan Kesiapan Digital.	kurangnya pelatihan integritas dan isu kesejahteraan berdampak pada ketidakmampuan SDM di daerah untuk beradaptasi dengan cepat terhadap tuntutan transformasi digital dan standar integritas pelayanan yang tinggi dan dapat memicu terjadinya mal-administrasi.	Kurangnya Pelatihan Pegawai tentang standar etika pelayanan publik dan penanganan kelompok rentan (lansia/disabilitas), menyebabkan keluhan masyarakat dan praktik pelayanan yang tidak inklusif.	Mengaitkan kinerja individu pegawai dengan hasil Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala sebagai tolok ukur efektivitas pelatihan dan motivasi kerja serta Menetapkan mekanisme pengawasan dan penindakan tegas terhadap kasus maladministrasi, pungli, atau pelayanan yang tidak etis.

Berdasarkan Tabel 2.7 diatas dapat dipetakan Masalah Pokok dan Isu Strategis seperti di tabel 2.8 berikut ini :

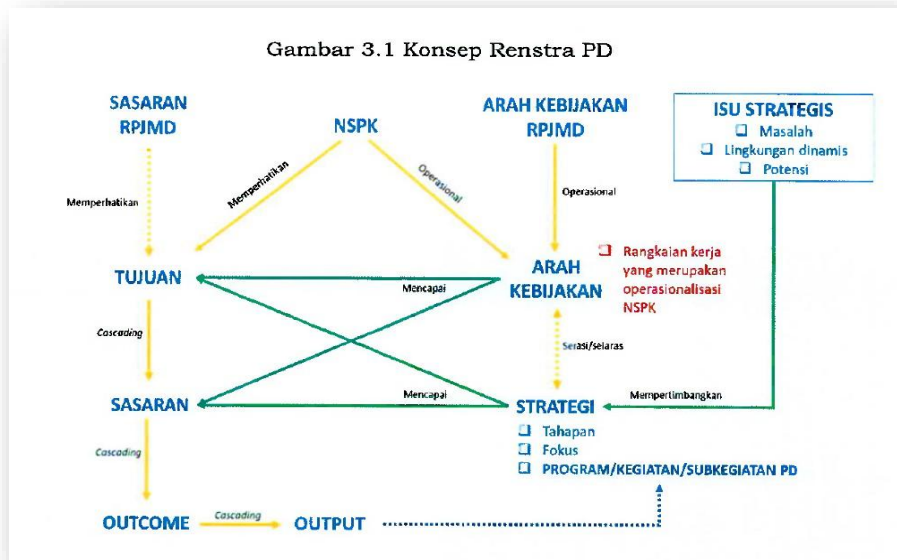
Tabel 2.8 Keterkaitan Isu Strategis Permasalahan Pelayanan Disdukcapil dalam Pelaksanaan Urusan Fungsi Penunjang Pemerintahan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	Masalah Pokok	Isu Strategis
1.	Rendahnya Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	Peningkatan Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan melalui pemanfaatan IKD
2.	Keterbatasan Sarana dan Prasarana	Menganggarkan penggantian bertahap peralatan kantor lama dengan model hemat energi untuk menciptakan efisiensi sumber daya jangka panjang.
3.	Peningkatan SDM Aparatur	Mengaitkan kinerja individu pegawai dengan hasil Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala sebagai tolok ukur efektivitas pelatihan dan motivasi kerja serta Menetapkan mekanisme pengawasan dan penindakan tegas terhadap kasus maladministrasi, pungli, atau pelayanan yang tidak etis.

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 3.1 Tujuan Renstra Disdukcapil Tahun 2025-2029



Sumber: Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

Tujuan rencana pembangunan daerah tahun 2025-2029 merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029 pada analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran dalam rencana strategis (Renstra) perangkat daerah sebagaimana diatur dalam PP Nomor 38 Tahun 2007, adalah untuk mewujudkan arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang lebih terarah dan terukur. Sedangkan, sasaran adalah rumus kondisi yang menggambarkan tercapai tujuan, berupa hasil perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil/outcome program perangkat daerah.

Perumusan VISI diharapkan dapat mendukung rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tanjungbalai Periode Tahun 2025-2029 yaitu :

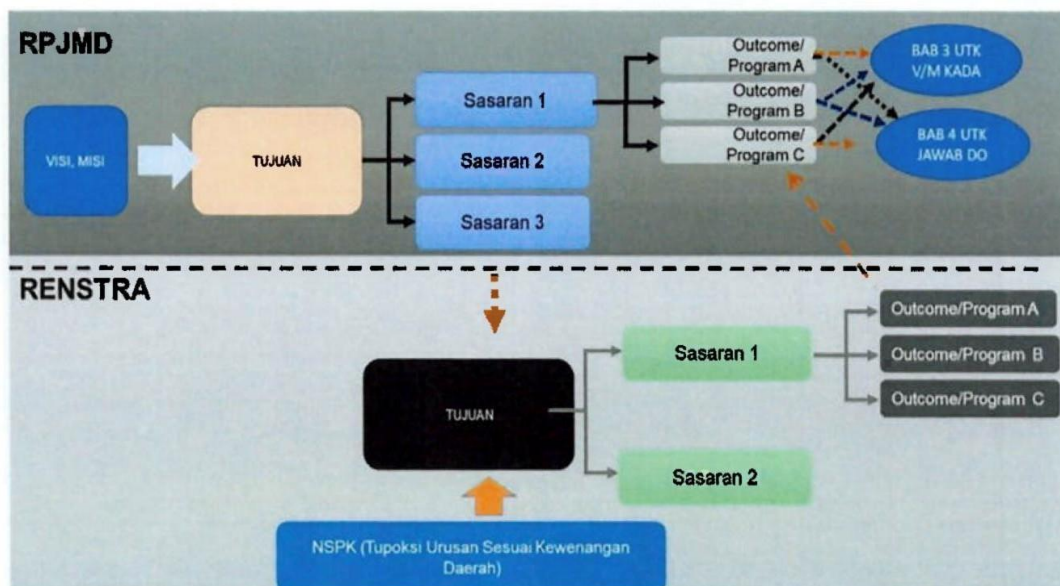
"MEWUJUDKAN KOTA TANJUNGBALAI ELOK, MAJU, AGAMAS DAN SEJAHTERA (EMAS)". Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai adalah mendukung terwujudnya visi tersebut dengan mengimplementasikan dan melaksanakan misi Kepala Daerah yang terkait dengan DISDUKCAPIL yaitu misi ke 1 (satu) yang berbunyi:

"Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Elok (transparan, akuntabel, dan berprestasi) dan menata kota yang humanis"

Adapun tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai yang merupakan salah satu OPD pelayanan publik, sehingga mendukung tujuan Pemerintah Kota Tanjungbalai dengan memperhatikan visi dan misi Kepala Daerah Walikota/Wakil Walikota serta mengacu pada Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 : *"Terwujudnya Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien"*. Berdasarkan Misi Pemerintah Kota Tanjungbalai 2025-2029 yang pertama, yaitu: "Elok tata kelola pemerintahan (transparan, akuntabel, dan berprestasi) dan penataan kota yang humanis," Disdukcapil berkontribusi signifikan karena urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan wajib yang bersentuhan langsung dengan pelayanan dasar sosial. Kontribusi Disdukcapil diwujudkan melalui Program dan Kegiatan dengan target kinerja yang berfokus pada kualitas pelayanan dan akurasi data.

### 3.2 Sasaran Renstra Disdukcapil Tahun 2025-2029

**Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD**



Sumber : Inmendagri nomor 2 tahun 2025

Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai adalah : *"Meningkatkan Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil"* keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029 diukur dari indikator-indikator yang sekaligus menjadi sasaran strategis dari tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Berikut penjabaran sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai berdasarkan tujuan beserta indikatornya tertuang pada Tabel 3.3 :



Tabel 3.3  
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Disdukcapil Kota Tanjungbalai

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya tata Kelola pemerintah yang baik	Terwujudnya Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	86,5	87	88	89	90	91	92	
		Meningkatkan Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	100	100	100	100	100	100	100	
			Persentase Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	88	89	90	91	92	93	94	

### 3.3 Strategi Dan Arah Kebijakan

Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana Tindakan yang komprehensif berisikan Langkah-langkah/Upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan sasaran Renstra PD. Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4 Penahapan Renstra PD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Penerapan Inovasi teknologi informasi untuk mempermudah pelayanan yang cepat dan efisien.	Meningkatkan kualitas SDM Aparatur dalam hal pelayanan.	Melengkapi sarana dan prasarana untuk fasilitas pelayanan yang lebih update dan lengkap	Mengevaluasi dan mengupdate SOP/SP yang telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan terbaru.	Terwujudnya Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien

### Strategi Disdukcapil

Strategi atau langkah-langkah yang dilakukan oleh Disdukcapil untuk mencapai Sasaran dan Tujuan yang telah ditetapkan, terutama dalam konteks Misi Walikota. Disdukcapil saat ini mengaktifkan layanan 'Jemput Bola' atau Pelayanan Bergerak untuk membantu masyarakat yang tidak dapat melakukan perekaman dan pencetakan KTP langsung ke kantor Disdukcapil dikarenakan ada hal seperti sakit atau gangguan ODGJ.



### Arah Kebijakan Disdukcapil

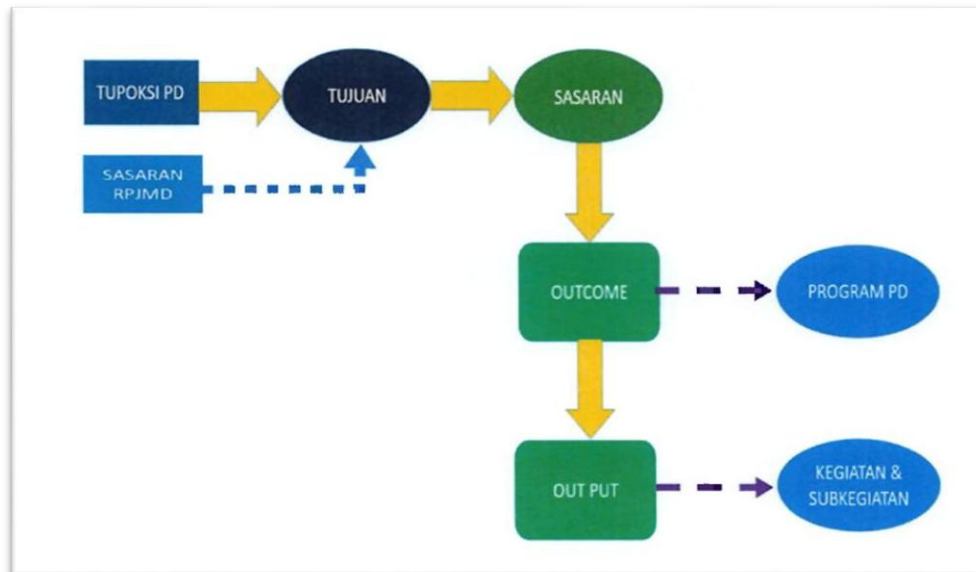
Arah Kebijakan Disdukcapil adalah prinsip-prinsip atau garis-garis besar tindakan yang akan diambil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran strategisnya. Secara umum, Arah Kebijakan Disdukcapil yang telah dirumuskan sebelumnya bertujuan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah: Di Kota Tanjungbalai. Arah Kebijakan Disdukcapil mengarahkan seluruh kegiatan dinas untuk mendukung Misi Walikota, terutama Misi 1: "Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Elok (transparan, akuntabel, dan berprestasi) dan menata kota yang humanis". Arah Kebijakan Disdukcapil dapat dirumuskan didalam tabel 3.5 berikut ini:

Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	1. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan  2. Peningkatan Kapasitas Pelayanan Disdukcapil melalui infrastruktur pelayanan, kepastian prosedur dan jenis layanan, dan kapasitas SDM pelayanan	

## BAB IV

### PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN DISDUKCAPIL



Gambar 4.1 : Sumber Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

#### 4.1 Rencana Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program yang ditetapkan merupakan rencana yang lebih konkret yang mencakup berbagai jenis kegiatan yang mengarah kepada tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan guna menjalankan berjalannya suatu organisasi telah dirumuskan program dan kegiatan untuk periode Renstra Tahun 2025-2029 direncanakan ada 5(lima) program yang terdiri dari 18 kegiatan.

Perumusan rencana Program , Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai dirangkum pada TABEL 4.1 berikut ini:



TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					5.752.689.656,77		5.982.797.243,00		6.024.676.824,00		6.024.676.824,00		6.060.824.885,00	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.541.808.456,77		5.681.624.400,00		5.643.200.326,00		5.643.200.326,00		5.650.429.932,00	
Meningkatnya Layanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi (%)	100	100	100	5.541.808.456,77	100	5.681.624.400,00	100	5.643.200.326,00	100	5.643.200.326,00	100	5.650.429.932,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					13.535.200,00		19.075.670,00		55.651.586,00		55.651.586,00		62.881.198,00	
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	0	50	55	13.535.200,00	57	19.075.670,00	60	55.651.586,00	70	55.651.586,00	75	62.881.198,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					41.533.000,00		78.723.692,00		90.299.600,00		90.299.600,00		97.529.219,00	
Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100	41.533.000,00	100	78.723.692,00	100	90.299.600,00	100	90.299.600,00	100	97.529.219,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					1.960.000,00		33.373.481,00		54.233.906,00		54.233.906,00		61.463.518,00	
Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan (Persentase)	97	98	99	1.960.000,00	99,5	33.373.481,00	99,5	54.233.906,00	100	54.233.906,00	100	61.463.518,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					153.853.000,00		170.000.000,00		181.291.406,00		181.291.406,00		188.521.018,00	
Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase)	100	100	100	153.853.000,00	100	170.000.000,00	100	181.291.406,00	100	181.291.406,00	100	188.521.018,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
TOTAL KESELURUHAN					5.752.689.656,77		5.982.797.243,00		6.024.676.824,00		6.024.676.824,00		6.060.824.885,00	



Rencana program dan kegiatan Disdukcdapil Kota Tanjungbalai selama kurun waktu 2025-2029 dapat dilihat pada table 4.2 sebagai berikut :

TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN FINAL RENSTRA PD  
PEMERINTAH KOTA TANJUNG BALAI

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	
2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
Meningkatnyatakelola pemerintah yang baik	Terwujudnya Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien	Meningkatkan Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Layanan Administrasi Perkantoran	Persentase Renja dan Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan (Indeks)			
					Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase)			
					Persentase Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (%)			
					Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi (%)	2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH ANDAERAH KABUPATEN/KOTA		
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.12.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.12.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.12.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.12.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.12.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan-SKPD (Dokumen)	2.12.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.12.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.12.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
					Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2.12.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.12.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	2.12.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2.12.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.12.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.12.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.12.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	2.12.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD							
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan	2.12.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan							



				Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.12.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	
			Persentase Tersunnya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.12.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
			Persentase Tersedianya Pakaian Dinas dan Terlaksananya Sosialisasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.12.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.12.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.12.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.12.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.12.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.12.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
			Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung untuk Kegiatan Perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi SKPD (Laporan)	2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan (Paket)	2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Peralatandan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.12.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Jumlah Paket Peralatandan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.12.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor	
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.12.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.12.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan (Paket)	2.12.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.12.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi SKPD (Laporan)	2.12.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.12.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.12.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Perorangan atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.12.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.12.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.12.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
				Jumlah Unit Peralatandan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.12.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.12.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.12.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.12.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.12.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	



				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.12.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.12.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.12.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.12.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.12.01.2.09-Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	2.12.01.2.09-Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.12.01.2.09-Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.12.01.2.09-Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.12.01.2.09-Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.12.01.2.09-Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.12.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.12.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.12.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.12.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.12.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.12.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
				Persentase Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	2.12.02.2.01-Pelayanan Pendaftaran Penduduk
					Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)	2.12.02.2.01-Pelayanan Pendaftaran Penduduk
					Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Dokumen)	2.12.02.2.01-Pelayanan Pendaftaran Penduduk
					Jumlah Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran Dan Perkembangan Penduduk (Dokumen)	2.12.02.2.01-Pelayanan Pendaftaran Penduduk
					Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	2.12.02.2.01-Pelayanan Pendaftaran Penduduk
					Jumlah Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Laporan)	2.12.02.2.01-Pelayanan Pendaftaran Penduduk
					Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Laporan)	2.12.02.2.01-Pelayanan Pendaftaran Penduduk
					Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk (Orang)	2.12.02.2.01-Pelayanan Pendaftaran Penduduk
					Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)	2.12.02.2.01.0001 - Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
					Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	2.12.02.2.01.0002 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk
					Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk (Orang)	2.12.02.2.01.0003 - Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk
					Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	2.12.02.2.01.0004 - Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
					Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Dokumen)	2.12.02.2.01.0005 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan



				Jumlah Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Laporan)	2.12.02.2.01.0006 - Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	
				Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Laporan)	2.12.02.2.01.0007 - Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	
				Jumlah Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk (Dokumen)	2.12.02.2.01.0008 - Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	
			Persentase Tersedianya Informasi terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Dokumen)	2.12.02.2.02 - Penataan Pendaftaran Penduduk	
				Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun (Dokumen)	2.12.02.2.02 - Penataan Pendaftaran Penduduk	
				Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun (Dokumen)	2.12.02.2.02.0001 - Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	
				Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Dokumen)	2.12.02.2.02.0002 - Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	
			Persentase Terselenggaranya Koordinasi terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan (Dokumen)	2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	
				Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Tersedia (Dokumen)	2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	
				Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk (Laporan)	2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	
				Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk (Laporan)	2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	
				Jumlah Pemangku Kepentingan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk (Orang)	2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	2.12.02.2.03.0001 - Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	2.12.02.2.03.0002 - Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk (Laporan)	2.12.02.2.03.0003 - Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	
				Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan (Dokumen)	2.12.02.2.03.0004 - Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	
				Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk (Laporan)	2.12.02.2.03.0005 - Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	
				Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	2.12.02.2.03.0006 - Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk	
				Jumlah Pemangku Kepentingan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk (Orang)	2.12.02.2.03.0007 - Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	
				Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Tersedia (Dokumen)	2.12.02.2.03.0008 - Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk	
			Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	2.12.02.2.04 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	
				Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk (Laporan)	2.12.02.2.04 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	
				Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk (Laporan)	2.12.02.2.04 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	



				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	2.12.02.2.04.0001 - Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk
				Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk (Laporan)	2.12.02.2.04.0002 - Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk
				Jumlah Laporan Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk (Laporan)	2.12.02.2.04.0003 - Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk
		Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil		Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03-PROGRAM PENCATATAN SIPIL
				Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03-PROGRAM PENCATATAN SIPIL
				Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03-PROGRAM PENCATATAN SIPIL
			Persentase Cakupan Layanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Laporan Peristiwa Penting (Dokumen)	2.12.03.2.01-Pelayanan Pencatatan Sipil
				Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil (Dokumen)	2.12.03.2.01-Pelayanan Pencatatan Sipil
				Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Paket)	2.12.03.2.01-Pelayanan Pencatatan Sipil
				Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun (Dokumen)	2.12.03.2.01-Pelayanan Pencatatan Sipil
				Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	2.12.03.2.01-Pelayanan Pencatatan Sipil
				Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Laporan Peristiwa Penting (Dokumen)	2.12.03.2.01.0001 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Laporan Peristiwa Penting
				Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	2.12.03.2.01.0002 - Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
				Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil (Dokumen)	2.12.03.2.01.0003 - Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil
				Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun (Dokumen)	2.12.03.2.01.0004 - Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil
				Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Paket)	2.12.03.2.01.0005 - Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan
			Persentase Terselenggaranya Koordinasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil (Dokumen)	2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
				Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil (Dokumen)	2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
				Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil (Dokumen)	2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil (Laporan)	2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil (Laporan)	2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam (Laporan)	2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
				Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
				Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil (Laporan)	2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
				Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait	2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil



					Pencatatan Sipil (Orang)	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam (Laporan)	2.12.03.2.02.0001 - Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (Laporan)	2.12.03.2.02.0002 - Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil (Laporan)	2.12.03.2.02.0003 - Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil
					Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	2.12.03.2.02.0004 - Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil
					Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil (Dokumen)	2.12.03.2.02.0005 - Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil (Laporan)	2.12.03.2.02.0006 - Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil
					Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil (Dokumen)	2.12.03.2.02.0007 - Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil
					Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil (Laporan)	2.12.03.2.02.0008 - Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil
					Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil (Dokumen)	2.12.03.2.02.0009 - Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil
					Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pencatatan Sipil (Orang)	2.12.03.2.02.0010 - Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil
				Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	2.12.03.2.03 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan (Laporan)	2.12.03.2.03 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
					Jumlah Laporan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan (Laporan)	2.12.03.2.03 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan (Laporan)	2.12.03.2.03.0002 - Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil
					Jumlah Laporan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan (Laporan)	2.12.03.2.03.0003 - Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil
					Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	2.12.03.2.03.0004 - Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil
			Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan		Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan (Persentase)	2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
				Persentase Tersedianya Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen)	2.12.04.2.01 - Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
					Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	2.12.04.2.01 - Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
					Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah (Laporan)	2.12.04.2.01 - Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
					Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen)	2.12.04.2.01.0001 - Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
					Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	2.12.04.2.01.0002 - Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan
					Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah (Laporan)	2.12.04.2.01.0003 - Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah



				Persentase Tersedianya Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun (Dokumen)	2.12.04.2.02 - Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun (Dokumen)	2.12.04.2.02.0001 - Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
				Persentase Tersedianya Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan (Dokumen)	2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan Masyarakat (Laporan)	2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi (Dokumen)	2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri (Dokumen)	2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
					Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	2.12.04.2.03.0001 - Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri (Dokumen)	2.12.04.2.03.0002 - Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	2.12.04.2.03.0003 - Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	2.12.04.2.03.0004 - Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	
					Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	2.12.04.2.03.0005 - Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi (Dokumen)	2.12.04.2.03.0006 - Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	
					Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan Masyarakat (Laporan)	2.12.04.2.03.0007 - Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan (Dokumen)	2.12.04.2.03.0008 - Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	
				Persentase Tersedianya Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan (Dokumen)	2.12.04.2.04 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
					Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan (Laporan)	2.12.04.2.04 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	2.12.04.2.04 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	2.12.04.2.04.0001 - Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Hasil Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di	2.12.04.2.04.0002 - Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang	



					Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan (Dokumen)	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	
					Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan (Laporan)	2.12.04.2.04.0003 - Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	
			Meningkatnya kualitas profil kependudukan		Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase)	2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	
				Persentase Tersedianya Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.12.05.2.01 - Penyusunan Profil Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangandan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun (Dokumen)	2.12.05.2.01 - Penyusunan Profil Kependudukan	
					Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.12.05.2.01.0001 - Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangandan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun (Dokumen)	2.12.05.2.01.0002 - Penyusunan Profil Data Perkembangandan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	



Indikatif Pendanaan Tahun 2025-2029

Perumusan rencana kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Disdukcapil kota tanjungbalai tahun 2025-2029 dapat di lihat di tabel 4.2 berikut :

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN  
PEMERINTAH KOTA TANJUNG BALAI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				5.752.689.656,77		5.982.797.243,00		6.024.676.824,00		6.024.676.824,00		6.060.824.885,00		
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.541.808.456,77		5.681.624.400,00		5.643.200.326,00		5.643.200.326,00		5.650.429.932,00		
Meningkatnya Layanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi (%)	100	100	5.541.808.456,77	100	5.681.624.400,00	100	5.643.200.326,00	100	5.643.200.326,00	100	5.650.429.932,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.01 - Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				46.573.300,00		33.394.800,00		31.502.000,00		31.502.000,00		33.475.000,00		
Persentase Renja dan Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinas Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen)	0	1	46.573.300,00	1	33.394.800,00	1	31.502.000,00	1	31.502.000,00	1	33.475.000,00		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinas Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)	0	2		1		1		1		1			



	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0	0		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	2		2		2		2		2		
2.12.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6.482.000,00		7.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	2	6.482.000,00	2	7.000.000,00	2	6.000.000,00	2	6.000.000,00	2	6.000.000,00	
2.12.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				850.000,00		500.000,00		550.000,00		550.000,00		575.000,00	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0	2	850.000,00	1	500.000,00	1	550.000,00	1	550.000,00	1	575.000,00	
2.12.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		500.000,00		550.000,00		550.000,00		575.000,00	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0	0	0,00	1	500.000,00	1	550.000,00	1	550.000,00	1	575.000,00	
2.12.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				874.800,00		894.800,00		902.000,00		902.000,00		1.000.000,00	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0	1	874.800,00	1	894.800,00	1	902.000,00	1	902.000,00	1	1.000.000,00	
2.12.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				0,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0	1	0,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	
2.12.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6.913.500,00		4.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		4.075.000,00	



Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	-	1	6.913.500,00	1	4.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	4.075.000,00		
2.12.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				31.453.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.750.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	1	31.453.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.750.000,00		
2.12.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.891.464.737,00		2.947.505.000,00		2.953.841.326,00		2.953.841.326,00		2.953.654.932,00		
Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0	1	2.891.464.737,00	1	2.947.505.000,00	1	2.953.841.326,00	1	2.953.841.326,00	1	2.953.654.932,00		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	20	20		20		20		20		20			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	-	-		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	-	-		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	-	-		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0	0		1		1		1		1			
2.12.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.887.759.737,00		2.944.255.000,00		2.950.576.326,00		2.950.576.326,00		2.950.379.932,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	20	20	2.887.759.737,00	20	2.944.255.000,00	20	2.950.576.326,00	20	2.950.576.326,00	20	2.950.379.932,00		
2.12.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	-	-	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		



2.12.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	-	-	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	
2.12.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	-	-	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	
2.12.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3.705.000,00		3.250.000,00		3.265.000,00		3.265.000,00		3.275.000,00	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	-	1	3.705.000,00	1	3.250.000,00	1	3.265.000,00	1	3.265.000,00	1	3.275.000,00	
2.12.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0	0	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	
2.12.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	
2.12.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	
2.12.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	



Persentase Tersusunnya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	-	-		-		-		-		-			
2.12.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
2.12.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
2.12.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0,00		45.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Persentase Tersedianya Pakaian Dinas dan Terlaksananya Sosialisasi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	-	-	0,00	2	45.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	-	-		20		-		-		-			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	-	-		-		-		-		-			
2.12.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0,00		30.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	-	-	0,00	20	30.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
2.12.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0,00		15.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	-	-	0,00	2	15.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00		
2.12.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				777.186.300,00		840.564.000,00		886.600.000,00		886.600.000,00		878.100.000,00		



Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung untuk Kegiatan Perkantoran	Jumlah Paket Komponer Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	777.186.300,00	1	840.564.000,00	1	886.600.000,00	1	886.600.000,00	1	878.100.000,00		
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	-	10		10		10		10		10			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5	3		5		3		3		3			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	240	220		250		225		225		230			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	-	40		40		40		40		40			
2.12.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.860.000,00		1.634.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		2.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponer Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	2.860.000,00	1	1.634.000,00	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00	1	2.000.000,00		
2.12.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				568.482.500,00		600.000.000,00		615.000.000,00		615.000.000,00		600.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	-	40	568.482.500,00	40	600.000.000,00	40	615.000.000,00	40	615.000.000,00	40	600.000.000,00		
2.12.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				34.387.000,00		30.000.000,00		32.000.000,00		32.000.000,00		35.000.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	-	10	34.387.000,00	10	30.000.000,00	10	32.000.000,00	10	32.000.000,00	10	35.000.000,00		
2.12.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				18.440.000,00		24.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		22.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	240	220	18.440.000,00	250	24.000.000,00	225	20.000.000,00	225	20.000.000,00	230	22.000.000,00		
2.12.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				20.560.800,00		20.620.000,00		16.000.000,00		16.000.000,00		17.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang	5	5	20.560.800,00	5	20.620.000,00	5	16.000.000,00	5	16.000.000,00	5	17.000.000,00		



	Disediakan (Paket)													
2.12.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				4.198.000,00		2.010.000,00		2.100.000,00		2.100.000,00		2.100.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5	3	4.198.000,00	5	2.010.000,00	3	2.100.000,00	3	2.100.000,00	3	2.100.000,00		
2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				128.258.000,00		162.300.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	-	1	128.258.000,00	1	162.300.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
2.12.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				85.632.000,00		222.000.000,00		165.000.000,00		165.000.000,00		183.000.000,00		
Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	2	85.632.000,00	4	222.000.000,00	4	165.000.000,00	4	165.000.000,00	4	183.000.000,00		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	-	2		2		2		2		2			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	-		2		2		2		2			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	-		2		0		0		2			
2.12.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		65.000.000,00		0,00		0,00		88.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	-	0,00	2	65.000.000,00	0	0,00	0	0,00	2	88.000.000,00		
2.12.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		72.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	-	0,00	2	72.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00	2	0,00		
2.12.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				72.632.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	-	2	72.632.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00		
2.12.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				13.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00		



Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	2	13.000.000,00	4	35.000.000,00	4	40.000.000,00	4	40.000.000,00	4	45.000.000,00		
2.12.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.488.002.119,77		1.526.160.600,00		1.529.200.000,00		1.529.200.000,00		1.525.000.000,00		
Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5	36	1.488.002.119,77	36	1.526.160.600,00	36	1.529.200.000,00	36	1.529.200.000,00	36	1.525.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	-	250		250		250		250					
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12					
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	-	-		1		1		1					
2.12.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.500.000,00		4.000.000,00		4.200.000,00		4.200.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	-	250	3.500.000,00	250	4.000.000,00	250	4.200.000,00	250	4.200.000,00	250	5.000.000,00		
2.12.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				221.243.219,77		222.160.600,00		225.000.000,00		225.000.000,00		220.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5	36	221.243.219,77	36	222.160.600,00	36	225.000.000,00	36	225.000.000,00	36	220.000.000,00		
2.12.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	-	-	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
2.12.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.263.258.900,00		1.300.000.000,00		1.300.000.000,00		1.300.000.000,00		1.300.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.263.258.900,00	12	1.300.000.000,00	12	1.300.000.000,00	12	1.300.000.000,00	12	1.300.000.000,00		
2.12.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				252.950.000,00		67.000.000,00		67.057.000,00		67.057.000,00		67.200.000,00		
Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	-	252.950.000,00	1	67.000.000,00	1	67.057.000,00	1	67.057.000,00	1	67.200.000,00		



	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	1		1		1		1		1		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	-	1		0		0		0		0		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	-	2		2		2		2		2		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	-	10		2		2		2		2		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		-		1		1		1		1		
2.12.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					66.940.000,00		67.000.000,00		67.057.000,00		67.057.000,00		67.200.000,00
Tersedianya Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	-	2		66.940.000,00		67.000.000,00		67.057.000,00		67.057.000,00		67.200.000,00
2.12.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Tersedianya Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	-	1		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2.12.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					28.760.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	-	10		28.760.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2.12.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					157.250.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	1		157.250.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2.12.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00



Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	-	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	
2.12.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-		0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				13.535.200,00		19.075.670,00		55.651.586,00		55.651.586,00		62.881.198,00	
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	0	55	13.535.200,00	57	19.075.670,00	60	55.651.586,00	70	55.651.586,00	75	62.881.198,00	2.12.0.00.0.00.01.00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02.2.01 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk				13.535.200,00		15.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		48.000.000,00	
Persentase Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Dokumen)	-	1	13.535.200,00	1	15.000.000,00	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00	1	48.000.000,00	
	Jumlah Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran Dan Perkembangan Penduduk (Dokumen)	-	1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	-	-		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Laporan)	-	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Laporan)												
	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk (Orang)	-	-		100		100		100		100		
	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	-	1		1		1		1		1		



	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)	-	-		1		1		1		1		
2.12.02.2.01.0001 - Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				0,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		10.000.000,00	
Tersedianya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)	-	-	0,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	10.000.000,00	
2.12.02.2.01.0002 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				0,00		5.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		10.000.000,00	
Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	-	-	0,00	1	5.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	10.000.000,00	
2.12.02.2.01.0003 - Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Terlaksananya Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk (Orang)	-	-	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
2.12.02.2.01.0004 - Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				13.535.200,00		5.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		28.000.000,00	
Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	-	1	13.535.200,00	1	5.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	28.000.000,00	
2.12.02.2.01.0005 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Dokumen)	-	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	
2.12.02.2.01.0006 - Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Terlaksananya Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Laporan)	-	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	
2.12.02.2.01.0007 - Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa				0		0		0		0		0	



Kependudukan														
Terlaksananya Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Laporan)			0		0		0		0		0		
2.12.02.2.01.0008 - Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	Jumlah Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk (Dokumen)	-	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
2.12.02.2.02 - Penataan Pendaftaran Penduduk				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Persentase Tersedianya Informasi terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun (Dokumen)	0	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
2.12.02.2.02.0001 - Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun (Dokumen)	0	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
2.12.02.2.02.0002 - Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		



Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Dokumen)	0	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				0,00		4.075.670,00		10.651.586,00		10.651.586,00		14.881.198,00		
Persentase Terselenggaranya Koordinasi terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk (Laporan)	0	1	0,00	1	4.075.670,00	1	10.651.586,00	1	10.651.586,00	1	14.881.198,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk (Orang)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Tersedia (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
2.12.02.2.03.0001 - Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan				0,00		1.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		5.000.000,00		



Pendaftaran Penduduk															
Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	0	1	0,00	1	1.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	5.000.000,00			
2.12.02.2.03.0002 - Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	0	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00			
2.12.02.2.03.0003 - Fasilitas Pendaftaran Penduduk				0,00		3.075.670,00		8.651.586,00		8.651.586,00		9.881.198,00			
Terfasilitasinya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas pendaftaran penduduk (Laporan)	0	1	0,00	1	3.075.670,00	1	8.651.586,00	1	8.651.586,00	1	9.881.198,00			
2.12.02.2.03.0004 - Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Terlaksananya Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan (Dokumen)	0	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00			
2.12.02.2.03.0005 - Sosialisasi Pendaftaran Penduduk				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Tersosialisasinya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk (Laporan)	0	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00			
2.12.02.2.03.0006 - Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Terlaksananya Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	0	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00			



2.12.02.2.03.0007 - Komunikasi Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk (Orang)	0	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
2.12.02.2.03.0008 - Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tesedianya Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Tersedia (Dokumen)	0	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
2.12.02.2.04 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk (Laporan)	-	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk (Laporan)	-	1		1		1		1		1			
2.12.02.2.04.0001 - Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	-	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
2.12.02.2.04.0002 - Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		



Terbinanya dan Terawasinya Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk (Laporan)	-	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
2.12.02.2.04.0003 - Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk (Laporan)	-	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL				41.533.000,00		78.723.692,00		90.299.600,00		90.299.600,00		97.529.219,00		
Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	41.533.000,00	100	78.723.692,00	100	90.299.600,00	100	90.299.600,00	100	97.529.219,00	2.12.0.00.0.00.01.00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100		100		100							
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100		100		100							
2.12.03.2.01 - Pelayanan Pencatatan Sipil				0,00		19.723.692,00		21.599.600,00		21.599.600,00		23.200.000,00		
Persentase Cakupan Layanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen)	0	1	0,00	1	19.723.692,00	1	21.599.600,00	1	21.599.600,00	1	23.200.000,00		
	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	0	3		3		3		3		3			
	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EJ, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Paket)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			



2.12.03.2.01.0001 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				0,00		3.723.692,00		3.599.600,00		3.599.600,00		3.700.000,00		
Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen)	0	1	0,00	1	3.723.692,00	1	3.599.600,00	1	3.599.600,00	1	3.700.000,00		
2.12.03.2.01.0002 - Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil				0,00		16.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00		19.500.000,00		
Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	0	3	0,00	3	16.000.000,00	3	18.000.000,00	3	18.000.000,00	3	19.500.000,00		
2.12.03.2.01.0003 - Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil (Dokumen)	0	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
2.12.03.2.01.0004 - Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun (Dokumen)	0	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
2.12.03.2.01.0005 - Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Paket)	0	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				41.533.000,00		56.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		67.829.219,00		
Persentase Terselenggaranya Koordinasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait	-	1	41.533.000,00	1	56.000.000,00	1	65.000.000,00	1	65.000.000,00	1	67.829.219,00		



Pencatatan Sipil (Dokumen)													
Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pencatatan Sipil (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (Laporan)	-	1		1		1		1		1			
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil (Laporan)	-	1		1		1		1		1			
Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pencatatan Sipil (Orang)	0	1		1		1		1		1			
Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			



	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil (Dokumen)	-	1				1		1		1			
2.12.03.2.02.0001 - Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Terlaksananya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam (Laporan)	0	1		0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	
2.12.03.2.02.0002 - Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Terlaksananya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (Laporan)	-	1		0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	



2.12.03.2.02.0003 - Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil (Laporan)	0	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
2.12.03.2.02.0004 - Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil				0,00		4.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.829.219,00		
Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	-	1	0,00	1	4.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.829.219,00		
2.12.03.2.02.0005 - Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil (Dokumen)	-	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
2.12.03.2.02.0006 - Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil				0,00		4.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		5.000.000,00		
Terfasilitasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil (Laporan)	0	1	0,00	1	4.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	5.000.000,00		
2.12.03.2.02.0007 - Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terselenggaranya Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil (Dokumen)	-	1	0,00		0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
2.12.03.2.02.0008 - Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil				41.533.000,00		48.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		57.000.000,00		
Tersosialisasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil (Laporan)	-	1	41.533.000,00	1	48.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	57.000.000,00		



2.12.03.2.02.0009 - Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil (Dokumen)	0	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
2.12.03.2.02.0010 - Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pencatatan Sipil (Orang)	0	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
2.12.03.2.03 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				0,00		3.000.000,00		3.700.000,00		3.700.000,00		6.500.000,00		
Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	-	1	0,00	1	3.000.000,00	1	3.700.000,00	1	3.700.000,00	1	6.500.000,00		
	Jumlah Laporan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan (Laporan)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
2.12.03.2.03.0002 - Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil				0,00		0,00		0,00		0,00		5.000.000,00		
Terbinanya dan Terawasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan (Laporan)	0	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	5.000.000,00		



2.12.03.2.03.0003 - Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil				0,00		0,00		0,00		0,00		500.000,00		
Terlaksananya Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan (Laporan)	-	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	500.000,00		
2.12.03.2.03.0004 - Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil				0,00		3.000.000,00		3.700.000,00		3.700.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	-	1	0,00	1	3.000.000,00	1	3.700.000,00	1	3.700.000,00	1	1.000.000,00		
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				1.960.000,00		33.373.481,00		54.233.906,00		54.233.906,00		61.463.518,00		
Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan (Persentase)	97	99	1.960.000,00	99,5	33.373.481,00	99,5	54.233.906,00	100	54.233.906,00	100	61.463.518,00	2.12.0.00.0.00.01.00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.04.2.01 - Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan				0,00		10.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		34.000.000,00		
Persentase Tersedianya Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	0	0	0,00	1	10.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	34.000.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah (Laporan)	0	0		1		1		1		1			



	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen)	1	0		1		1		1		1		
2.12.04.2.01.0001 - Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan				0,00		5.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen)	1	0	0,00	1	5.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
2.12.04.2.01.0002 - Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				0,00		5.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		24.000.000,00	
Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	0	0	0,00	1	5.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	24.000.000,00	
2.12.04.2.01.0003 - Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Terlaksananya Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah (Laporan)	0	0	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	
2.12.04.2.02 - Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Persentase Tersedianya Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun (Dokumen)	0	0	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2.12.04.2.02.0001 - Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Terlaksananya Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun (Dokumen)	0	0	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	



2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1.960.000,00		23.373.481,00		24.233.906,00		24.233.906,00		27.463.518,00		
Persentase Tersedianya Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)			1.960.000,00		23.373.481,00		24.233.906,00		24.233.906,00		27.463.518,00		
	Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri (Dokumen)													
	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi (Dokumen)													
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	0	12		12	12		12		12				
	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan (Dokumen)													
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)													
	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)													
	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat (Laporan)													
2.12.04.2.03.0001 - Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					0	0		0		0		0		
Terlaksananya Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)				0	0		0		0		0		



2.12.04.2.03.0002 - Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri					0	0	0	0	0	0	0	0	
Terlaksananya Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri	Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri (Dokumen)				0	0	0	0	0	0	0	0	
2.12.04.2.03.0003 - Fasilitas Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1.960.000,00		23.373.481,00		24.233.906,00		24.233.906,00		27.463.518,00	
Terfasilitasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	0	12	1.960.000,00	12	23.373.481,00	12	24.233.906,00	12	24.233.906,00	12	27.463.518,00	
2.12.04.2.03.0004 - Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan				0		0		0		0		0	
Terlaksananya Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)				0	0		0		0		0	
2.12.04.2.03.0005 - Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				0		0		0		0		0	
Tersosialisasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)				0	0		0		0		0	
2.12.04.2.03.0006 - Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi				0		0		0		0		0	
Terlaksananya Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi (Dokumen)				0	0		0		0		0	
2.12.04.2.03.0007 - Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat				0		0		0		0		0	
Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat (Laporan)				0	0		0		0		0	
2.12.04.2.03.0008 - Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan				0		0		0		0		0	



Terlaksananya Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan (Dokumen)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.12.04.2.04 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Persentase Tersedianya Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Jumlah Dokumen Hasil Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan (Dokumen)												
	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan (Laporan)												
2.12.04.2.04.0001 - Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.12.04.2.04.0002 - Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan				0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Terlaksananya Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan (Dokumen)				0		0		0		0		0	
2.12.04.2.04.0003 - Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan					0		0		0		0		0	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan (Laporan)				0		0		0		0		0	
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					153.853.000,00		170.000.000,00		181.291.406,00		181.291.406,00		188.521.018,00	
Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase)	100	100		153.853.000,00	100	170.000.000,00	100	181.291.406,00	100	181.291.406,00	100	188.521.018,00	2.12.0.00.0.00.01.00.00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.05.2.01 - Penyusunan Profil Kependudukan					153.853.000,00		170.000.000,00		181.291.406,00		181.291.406,00		188.521.018,00	
Persentase Tersedianya Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	2		153.853.000,00	2	170.000.000,00	2	181.291.406,00	2	181.291.406,00	2	188.521.018,00	
	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun (Dokumen)	2	2			2		2		2		2		
2.12.05.2.01.0001 - Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota					52.500.000,00		52.500.000,00		52.500.000,00		52.500.000,00		52.500.000,00	
Tersedianya Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	2		52.500.000,00	2	52.500.000,00	2	52.500.000,00	2	52.500.000,00	2	52.500.000,00	
2.12.05.2.01.0002 - Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain					101.353.000,00		117.500.000,00		128.791.406,00		128.791.406,00		136.021.018,00	
Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun (Dokumen)	2	2		101.353.000,00	2	117.500.000,00	2	128.791.406,00	2	128.791.406,00	2	136.021.018,00	



Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Rancangan Akhir Renstra Pd

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Indeks	86,5	87	88	89	90	91	92	
2	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase	88	89	90	91	92	93	94	

Tabel 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1	Perekaman KTP Elektronik		persen	98,80	99,50	99,51	99,52	99,53	99,54	99,55	
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA		persen	58,27	55	56	57	58	59	60	
3	Kepemilikan Akta Kelahiran		persen	-	70	71	72	73	74	75	
4	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama		persen	11,76	11,76	11,80	11,82	11,85	11,86	11,70	
5	Rate net recent Migrasi			-	-	-	-	-	-	-	
6	Cakupan Kepemilikan akta kelahiran balita		persen	99,72	99,69	99,70	99,71	99,72	99,73	99,74	
7	Cakupan kepemilikan akta cerai		persen	68,75	75	76	77	78	79	80	
8	Cakupan kepemilikan akta Nikah		persen	73,61	80	81	82	83	84	85	
9	Cakupan kepemilikan akta Kematian		persen	100	100	100	100	100	100	100	
10	Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk		persen	-	90	91	92	93	94	95	
11	Cakupan Layanan Pencatatan Sipil.		persen	-	90	91	92	93	94	95	
12	Persentase Tersedianya Informasi Administrasi Kependudukan		persen	100	100	100	100	100	100	100	



## BAB V

### P E N U T U P

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Disdukcapil Kota Tanjungbalai. Berbekal dokumen RENSTRA ini, Disdukcapil Kota Tanjungbalai berkomitmen untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima, akuntabel, dan berbasis digital, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan dokumen administrasi kependudukan yang akurat, cepat, dan mudah.

Keberhasilan Pelaksanaan Renstra Disdukcapil Kota Tanjungbalai periode 2025-2029 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan pendanaan serta komitmen pimpinan dan semua staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai dan menjadi acuan bagi bidang-bidang di Disdukcapil dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi utama dalam rangka peningkatan kinerja lembaga maupun kinerja aparatur.

Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KOTA TANJUNGBALAI



HERI ANTONI, S.STP, MAP  
Pembina Tk.I  
NIP. 19830416 200212 1 001